

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN: RENCANA OPERASIONALISASI SENTRA BISNIS PERIKANAN TERPADU NUMANA KABUPATEN WAKATOBI

Stakeholder Analysis: Operating Plan for Numana Integrated Fisheries Business Center Wakatobi Regency

Oleh:

Zahirudin¹, Iin Solihin^{2*}, Tri Wiji Nurani², Ronny Irawan Wahyu²

¹Program Studi Teknologi Perikanan Laut, IPB University,
Bogor, Indonesia

²Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Bogor,
Indonesia

*Korespondensi penulis: iin_solihin@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupaya membangun Sentra Bisnis Perikanan Terpadu (SBPT) pada kawasan taman nasional. Wilayah dengan banyak kepentingan dalam penggunaannya (proyek infrastruktur, konservasi laut, dan pemanfaatan sumberdaya ikan) melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemangku kepentingan di wilayah pembangunan SBPT Numana dan memberikan solusi terhadap kendala pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana berdasarkan pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan. Data yang dikumpulkan adalah pemangku kepentingan yang terlibat, pengaruh dan kepentingan, harapan, dan kendala para pemangku kepentingan. Analisis data menggunakan analisis pemangku kepentingan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 22 pemangku kepentingan yang dipetakan menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat pengaruh-kepentingan yang berbeda-beda yaitu kelompok *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowds*. Rekomendasi yang diusulkan adalah menyelesaikan dokumen Amdal dan WKOPP SBPT Numana, meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan komitmen perjanjian kerja sama, dan berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana.

Kata kunci: kepentingan, pemangku kepentingan, pengaruh, rekomendasi, Sentra Bisnis Perikanan Terpadu Numana

ABSTRACT

Wakatobi Regency Government is trying to build an Integrated Fisheries Business Center (SBPT) in the national park area. Areas with multiple interests in use (infrastructure projects, marine conservation, and utilization of fish resources) involve multiple stakeholders. This study aims to identify stakeholders in the construction area of SBPT Numana and provide solutions to the constraints on the construction and operation of SBPT Numana based to the influence and interests of stakeholders. The data collected are the stakeholders involved, the influence and interest, expectations, and constraints of stakeholders. Data analysis uses stakeholder analysis through qualitative and quantitative approaches and descriptive-qualitative analysis. The results showed that there are 22 stakeholders who are mapped into four groups based on different levels of influence and interests, namely key players, context setters, subjects, and crowds. The recommendations proposed solution is completing the Amdal and WKOPP documents for SBPT Numana, increasing the involvement of DKP Southeast Sulawesi

Province, implementing the commitments of the cooperation agreement, and sharing responsibilities with stakeholders who have influence and interest in SBPT Numana.

Key words: *influence, interest, Numana Integrated Fisheries Business Center, recommendation, stakeholders*

PENDAHULUAN

Perairan Kabupaten Wakatobi merupakan bagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, yakni Laut Banda, memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Wakatobi sebesar 20.390 ton/tahun, baru 1,97% dari total estimasi potensi sumberdaya ikan sebesar 1.033.979 ton di WPPNRI 714. (DKP Kab. Wakatobi 2021; KEPMEN-KP No. 19 Tahun 2022).

Pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Wakatobi memerlukan infrastruktur pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan dimaksudkan menjadi sentra produksi dan perdagangan perikanan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian di suatu kawasan (Soumokil 2021). Pelabuhan perikanan berperan sebagai basis utama kegiatan industri perikanan, pusat interaksi nelayan dengan pemerintah daerah, dan sebagai pendorong aktivitas usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan (Tahir *et al.* 2020).

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang diberi nama Sentra Bisnis Perikanan Terpadu (SBPT). Lokasi pelabuhan perikanan adalah di Desa Numana Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, ditetapkan melalui KEPMEN-KP No. 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

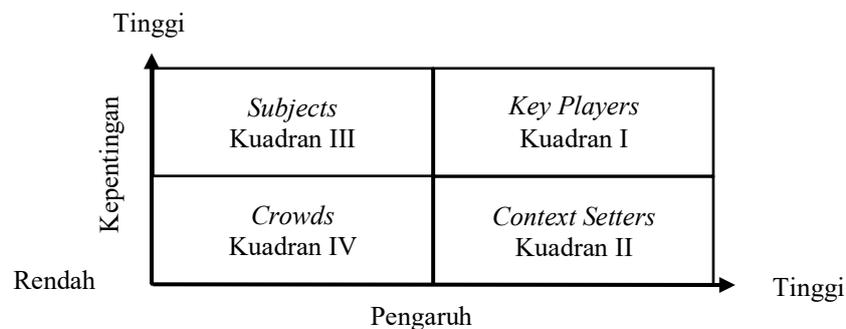
Pembangunan SBPT Numana berada pada kawasan taman nasional dengan status cagar biosfer dunia (Firmansyah *et al.* 2017) yang menjadikannya kawasan konservasi laut. Hal ini dapat memengaruhi upaya pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana, di mana tujuannya adalah eksploitasi/pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana merupakan proyek infrastruktur besar. Kondisi-kondisi tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan. Berdasarkan hal ini, pemangku kepentingan yang terlibat perlu diperhatikan agar proses keberlanjutan pembangunan dan upaya pengoperasian SBPT Numana dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi pemangku kepentingan di wilayah pembangunan SBPT Numana yang dapat mempengaruhi keberadaan SBPT Numana, dan 2) memberikan rekomendasi penyelesaian kendala pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana berdasarkan pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi sebagai lokasi pembangunan SBPT Numana. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner. Kuesioner berisikan identitas responden kunci, pertanyaan mengenai pengaruh, kepentingan, harapan, dan kendala pemangku kepentingan terhadap SBPT Numana. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan SBPT Numana, dan studi literatur.

Responden kunci penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi (Kepala Dinas, Kepala Bidang Usaha Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan, dan Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan) sebagai pemrakarsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi (Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Setelah memperoleh nilai \bar{Y} dan \bar{X} sebagai batas kuadran pada diagram kartesius, selanjutnya nilai tingkat kepentingan (Y_i) dan nilai tingkat pengaruh (X_i) masing-masing pemangku kepentingan diplotkan ke dalam matriks pengaruh-kepentingan (Gambar 1). Matriks pengaruh-kepentingan menggambarkan posisi dan peranan masing-masing pemangku kepentingan melalui pembagian kuadran, di mana sumbu x merupakan sumbu yang mewakili pengaruh sedangkan sumbu y mewakili kepentingan (Widodo *et al.* 2018). Pemangku kepentingan dibagi menjadi empat kelompok yaitu *key players* (kuadran I), *context setters* (kuadran II), *subjects* (kuadran III), dan *crowds* (kuadran IV). *Key players* memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi, *context setters* memiliki kepentingan rendah tapi pengaruhnya tinggi, *subjects* memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah, dan *crowds* memiliki kepentingan dan pengaruh rendah.



Gambar 1. Matriks pengaruh-kepentingan *stakeholders*

Langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi penyelesaian kendala. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif didukung dengan studi literatur. Penyusunan rekomendasi didasarkan pada: (1) kendala yang dapat menghambat proses pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana dan (2) harapan/aspirasi pemangku kepentingan (Tabel 3).

Kendala dan harapan pemangku kepentingan yang menjadi perhatian adalah kelompok dengan tingkat pengaruh dan/atau tingkat kepentingan tinggi, yaitu kelompok *key players*, *context setters*, dan *subjects*. Menurut Hidayat *et al.* (2020), kelompok pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi dapat memainkan peran sebagai pihak yang mengintervensi tahap perumusan dan implementasi kebijakan. Tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi masalah yang dapat terjadi (Bryson 2004).

Tabel 3. Usulan rekomendasi penyelesaian kendala para pemangku kepentingan

Pemangku Kepentingan	Harapan	Kendala	Rekomendasi
Kelompok ...			
1. ...			
2.			

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kunci, diketahui pemangku kepentingan yang terlibat, status keterlibatan, dan peran dalam upaya pengoperasian SBPT Numana. Penjabarannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pemangku kepentingan, status keterlibatan, dan perannya

No	Pemangku Kepentingan	Status Keterlibatan	Peran/Fungsi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi	Pra konstruksi; Konstruksi; Pasca konstruksi	Menyiapkan regulasi, administrasi, <i>monitoring</i> , dan evaluasi SBPT Numana.
2	Kelompok Nelayan/Nelayan	Pasca konstruksi	Basis data dokumen perizinan SBPT
3	PLN Rayon Wangi-Wangi	Konstruksi; Pasca konstruksi	Persetujuan pemasangan instalasi listrik dan pasokan listrik.
4	PDAM Wangi-Wangi	Konstruksi; Pasca konstruksi	Persetujuan pemasangan instalasi air bersih dan pasokan air.
5	Koperasi Nelayan	Pasca konstruksi	Memfasilitasi nelayan mendapatkan bantuan bidang perikanan; sebagai Lembaga keuangan.
6	Pertamina	Pasca konstruksi	Menyuplai bahan bakar minyak.
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Penetapan SBPT Numana sebagai calon pelabuhan perikanan; persetujuan pemanfaatan ruang laut.
8	Pengusaha Bidang Perikanan	Pasca konstruksi	Investasi bidang perikanan.
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Pra konstruksi; Konstruksi; Pasca konstruksi	Rekomendasi lokasi SBPT Numana pada RIPPN dan RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara; perizinan kapal; <i>monitoring</i> dan evaluasi SBPT.
10	BKIPM Bau-Bau Wilayah Kerja Wakatobi	Pasca konstruksi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkarantina ikan, pengendalian mutu, sistem jaminan mutu, keamanan hasil perikanan.
11	Kepala Desa Numana	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Pembebasan lahan akses masuk SBPT; pengawasan lingkungan.
12	Balai Taman Nasional Wakatobi	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Menetapkan bentuk kerjasama pembangunan SBPT Numana pada kawasan konservasi.
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi	Pra konstruksi	Menetapkan rencana pembangunan SBPT Numana dalam RPJMD
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi	Pasca konstruksi	Penyiapan jaringan komunikasi dan informatika bagi SBPT Numana.
15	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Penetapan izin lingkungan pembangunan SBPT Numana.
16	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	Pra konstruksi; Konstruksi	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk SBPT Numana.
17	DLH Kabupaten Wakatobi	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Berpartisipasi dalam penyusunan analisis dampak lingkungan SBPT Numana; pemantauan dan evaluasi lingkungan SBPT Numana
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Menentukan jalur pelayaran.
19	DPMPSTSP Kabupaten Wakatobi	Pasca konstruksi	Pemberian izin usaha; menarik investor.

No	Pemangku Kepentingan	Status Keterlibatan	Peran/Fungsi
20	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Pra konstruksi; Pasca konstruksi	Pelatihan dan/atau penyuluhan kepada nelayan.
21	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci	Pasca konstruksi	Penerbitan dokumen kelengkapan berlayar.
22	Perbankan	Pasca konstruksi	Penyedia modal berusaha bagi nelayan.

Status keterlibatan pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga yaitu pada saat pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi SBPT Numana. Selama pra konstruksi, pemangku kepentingan terlibat dalam pengurusan perizinan dan sosialisasi tentang SBPT Numana. Perizinan menjadi landasan diperbolehkannya konstruksi dan aktivitas pasca konstruksi. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perizinan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Numana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, dan NGO (Yayasan Konservasi Alam Nusantara). Konstruksi dimaksudkan sebagai aktivitas membangun sarana dan prasarana SBPT Numana. Setelah itu, pasca konstruksi akan diupayakan agar SBPT Numana dapat segera beroperasi.

Hasil analisis menggunakan persamaan (1), diperoleh nilai rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut dihitung menggunakan persamaan (2) untuk memperoleh nilai pembatas dalam diagram kartesius (2.7;2.9). Setelah itu, dilakukan pemetaan kelompok pemangku kepentingan pada matriks pengaruh-kepentingan (Tabel 5 dan Gambar 2).

Tabel 5 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat 22 pemangku kepentingan pada rencana pembangunan dan upaya pengoperasian SBPT Numana. Pemangku kepentingan tersebut dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowds*.

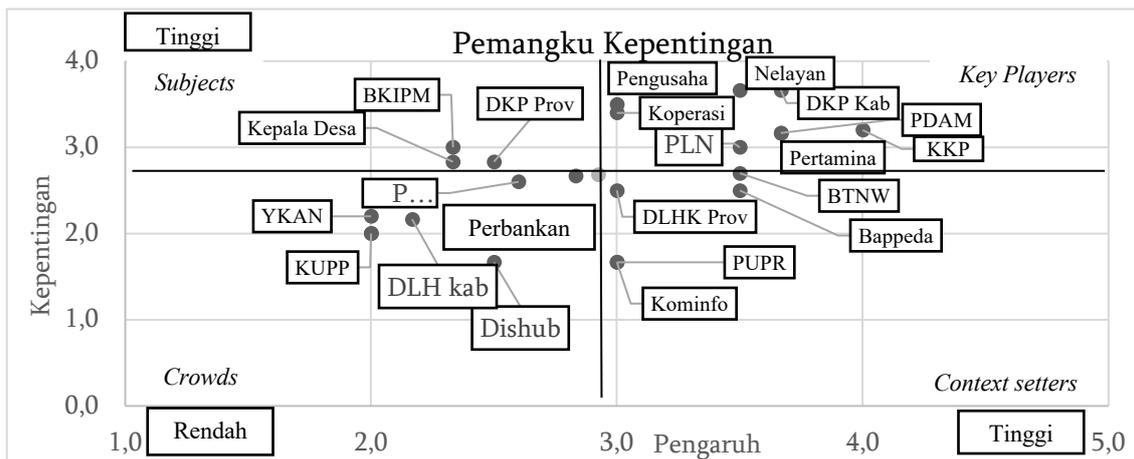
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kunci, diketahui pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut terhadap SBPT Numana. Berikut penjabaran pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

Kelompok *key players* adalah kelompok yang dinilai memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap SBPT Numana. Kelompok ini terdiri dari DKP Kabupaten Wakatobi, KKP, nelayan/kelompok nelayan, pengusaha bidang perikanan, PLN Rayon Wangi-Wangi, PDAM Wangi-Wangi, koperasi nelayan, dan Pertamina.

Kelompok *subjects* adalah kelompok yang dinilai memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah. Pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan kelompok *subjects* yaitu: (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan lokasi SBPT Numana sebagai calon pelabuhan pada RIPP. Kepentingannya adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila SBPT Numana telah beroperasi; (2) BKIPM Bau-Bau Wilayah Kerja Wakatobi berperan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkarantina ikan, pengendalian mutu, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kepentingannya adalah mengetahui komoditas perikanan yang keluar dari Kabupaten Wakatobi serta Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Kepala Desa Numana berupaya memperoleh persetujuan dan dukungan sosial masyarakat Desa Numana untuk pembangunan SBPT Numana. Kepentingannya adalah tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Numana.

Tabel 5. Kelompok pemangku kepentingan yang mempengaruhi SBPT Numana

No	Pemangku Kepentingan	Nilai Tingkat Pengaruh (X)							Nilai Tingkat Kepentingan (Y)						Kategori Kelompo k	
		x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	(\bar{X})	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆		(\bar{Y})
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi	4	4	3	4	3	4	3,7	4	4	4	3	3	4	3,7	<i>Key Players</i>
2	Kelompok Nelayan/Nelayan	4	4	3	3	4	3	3,5	4	4	3	3	4	4	3,7	<i>Key Players</i>
3	PLN Rayon Wangi-Wangi	4	4	2	3	4	4	3,5	4	4	2	3	3	2	3,0	<i>Key Players</i>
4	PDAM Wangi-Wangi	4	4	3	3	4	4	3,7	4	4	3	3	3	2	3,2	<i>Key Players</i>
5	Koperasi Nelayan	1	4	3	3	4	3	3,0	3	4	3	3	4	3	3,4	<i>Key Players</i>
6	Pertamina	3	4	3	4	4	4	3,7	3	4	2	3	4	3	3,2	<i>Key Players</i>
7	KKP	4	4	4	4	4	4	4,0	3	2	3	3	4	4	3,2	<i>Key Players</i>
8	Pengusaha Bidang Perikanan	3	3	2	3	3	4	3,0	3	4	3	3	4	4	3,5	<i>Key Players</i>
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	2	4	2,3	2	3	3	3	2	4	2,8	<i>Subjects</i>
10	BKIPM Bau-Bau Wilayah Kerja Wakatobi	2	1	3	2	3	3	2,3	3	3	3	3	3	3	3,0	<i>Subjects</i>
11	Kepala Desa Numana	3	3	2	3	2	2	2,5	3	4	2	3	2	3	2,8	<i>Subjects</i>
12	Balai Taman Nasional Wakatobi	3	4	2	4	4	4	3,5	3	3	2	2	3	3	2,7	<i>Context setters</i>
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi	4	3	3	4	4	3	3,5	4	1	2	2	4	2	2,5	<i>Context setters</i>
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi	4	4	2	3	3	2	3,0	4	1	1	1	1	2	1,7	<i>Context setters</i>
15	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	4	3	3	2	3	3	3,0	3	2	2	3	2	3	2,5	<i>Context setters</i>
16	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	3	3	3	3	3	3	3,0	3	1	2	1	1	2	1,7	<i>Context setters</i>
17	DLH Kabupaten Wakatobi	3	1	3	1	3	2	2,2	3	1	2	2	2	3	2,2	<i>Crowds</i>
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	2	3	3	2	2	3	2,5	2	1	2	1	1	3	1,7	<i>Crowds</i>
19	DPMPTSP Kabupaten Wakatobi	2	3	2	3	3	3	2,6	3	3	2	3	3	2	2,6	<i>Crowds</i>
20	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	2	2	1	2	2	3	2,0	2	3	2	2	2	2	2,2	<i>Crowds</i>
21	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci	2	1	2	2	2	3	2,0	2	2	1	3	2	2	2,0	<i>Crowds</i>
22	Perbankan	3	3	2	2	4	3	2,8	3	3	2	2	4	2	2,7	<i>Crowds</i>
<i>k</i>	Jumlah	65,3							59,8							
	Rata-Rata	$\bar{X} = 2,9$							$\bar{Y} = 2,7$							



Gambar 2. Matriks kategori kelompok pemangku kepentingan

Kelompok *context setters* adalah kelompok yang dinilai memiliki pengaruh tinggi tapi kepentingannya rendah. Pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan kelompok *context setters* yaitu: (1) Balai Taman Nasional Wakatobi berperan mengawasi pembangunan SBPT Numana, mengawasi biota laut yang dilindungi, dan melakukan perjanjian kerja sama pembangunan SBPT Numana dengan DKP Kabupaten Wakatobi. Kepentingannya terletak pada perlindungan, pengamanan, dan pelestarian kawasan Taman Nasional Wakatobi; (2) BAPPEDA Kabupaten Wakatobi berperan menetapkan program pembangunan SBPT Numana ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi; (3) Diskominfo Kabupaten Wakatobi menyiapkan jaringan komunikasi dan informatika yang baik untuk mendukung operasionalisasi SBPT Numana; (4) DLH Provinsi Sulawesi Tenggara berperan pada penerbitan izin lingkungan sebagai syarat pembangunan SBPT Numana. Kepentingannya adalah evaluasi lingkungan hidup pada SBPT Numana; (5) Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Nomor 640/18/2021 Tanggal 04 Agustus 2021) Tentang SBPT Numana telah terintegrasi dengan RTRW Kabupaten Wakatobi dan bolehnya melakukan pembangunan. Kepentingannya adalah adanya pemberian akses oleh SBPT terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum dan menganalisis kualitas pembangunan infrastruktur SBPT Numana.

Kelompok *crowds* adalah kelompok yang dinilai memiliki kepentingan dan pengaruh rendah. Pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan kelompok *crowds* yaitu: (1) DLH Kabupaten Wakatobi berkontribusi dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan SBPT Numana; (2) Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi turut menentukan jalur pelayaran dan melakukan pengaturan WKOPP secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Kepentingannya adalah terhadap mobilitas kapal laut di wilayah pelabuhan; (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi berperan dalam memberi izin usaha kepada para pengusaha perikanan, menarik investor untuk berinvestasi, dan melakukan pengukuran iklim investasi sektor perikanan. Kepentingannya adalah PAD; (4) Yayasan Konservasi Alam Nusantara memberikan saran/masukkan mengenai keberlanjutan/dampak lingkungan pembangunan SBPT Numana; (5) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci saat ini berperan dalam penerbitan dokumen kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dan dokumen kelengkapan berlayar; (6) Perbankan dapat menjadi penyedia modal bagi nelayan. Kepentingannya adalah keuntungan melalui aktivitas pinjaman modal oleh nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kunci, diketahui harapan dan kendala para pemangku kepentingan pada perencanaan pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana. Harapan dan kendala para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Pengaruh dan kepentingan kelompok *key players*

Pengaruh	Kepentingan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi (1) Menyiapkan regulasi dan administrasi yang berkaitan dengan SBPT (penganggaran, perencanaan, pembangunan, dan operasional); (2) <i>Monitoring</i> dan evaluasi SBPT Numana.	(1) Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan; (2) Pemberdayaan nelayan; (3) Pengelolaan TPI; (4) Pengendalian stok ikan di wilayah Kab. Wakatobi; dan (5) PAD.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (1) Penetapan Numana sebagai lokasi calon pelabuhan perikanan; (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor B.574/MEN-KP/XI/2021 guna pembangunan SBPT Numana.	(1) Pemulihan ekonomi khususnya masyarakat perikanan; (2) Kebutuhan data produksi perikanan dan target pencapaian jumlah produksi ikan; (3) Pemberdayaan masyarakat nelayan.
Nelayan/kelompok nelayan (1) Basis data penyusunan dokumen perizinan SBPT Numana (2) Menentukan pilihan lokasi SBPT; (3) Penyuplai ikan ke SBPT apabila telah beroperasi.	(1) Memanfaatkan akses fasilitas rantai dingin pada SBPT; (2) Mengakses BBM bersubsidi; (3) Jaminan pasar dengan harga yang lebih baik.
Pengusaha bidang perikanan Investasi usaha pada SBPT Numana.	Kemudahan mendapatkan stok ikan.
PLN Rayon Wangi-Wangi Menyuplai dan memenuhi kebutuhan listrik pelanggan sektor perikanan laut di SBPT Numana	Pendapatan negara
PDAM Wangi-Wangi Menyuplai air bersih ke SBPT Numana dan pelanggan sektor perikanan laut seperti nelayan dan industri perikanan lainnya.	perolehan pendapatan asli daerah.
Koperasi Nelayan (1) Menjembatani nelayan mendapatkan bantuan fasilitas perikanan; (2) Berperan sebagai lembaga keuangan dan saluran pemberdayaan bagi nelayan	Memanfaatkan sarana berusaha yang disediakan pada lokasi SBPT dan sebagai wadah simpan pinjam nelayan.
Pertamina Menyuplai bahan bakar minyak kepada nelayan	Pendapatan negara

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa terdapat tiga pemangku kepentingan yang memiliki kendala terhadap SBPT Numana yaitu DKP Kabupaten Wakatobi, DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Balai Taman Nasional Wakatobi. Harapan para pemangku kepentingan dapat menjadi landasan dalam menyusun rekomendasi penyelesaian kendala para pemangku kepentingan.

Tabel 7. Harapan dan kendala para pemangku kepentingan

Harapan	Kendala	Rekomendasi
DKP Kabupaten Wakatobi		
Mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah daerah Kab. Wakatobi (Merdeka Emas) berupa pembangunan SBPT Numana.	(1) Dokumen Amdal belum tersedia; (2) Sumber daya manusia pada kelembagaan pengelola SBPT belum terencana/tersedia (3) Belum ada penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan.	(1) Menyelesaikan dokumen Amdal; (2) Menyusun dokumen Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan (WKOPP) SBPT Numana; (3) Meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
Kelompok Nelayan/Nelayan Tidak terjadi <i>illegal fishing</i> , pengaturan pemasangan rumpon, dan peningkatan pendapatan nelayan.	-	(4) Melaksanakan komitmen Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Wakatobi bersama DKP Kabupaten Wakatobi;
Pengusaha Bidang Perikanan Mengembangkan /peluang usaha baru.	-	(5) Berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana untuk menjamin keberhasilan program SPBT Numana
DKP Provinsi Sulawesi Tenggara Pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana program kerja	Kurangnya partisipasi pada perencanaan dan pembangunan SBPT Numana	
BKIPM Bau-Bau Wilker Wakatobi Pemantauan lalulintas komoditas perikanan Kab. Wakatobi terpusat.	-	
Kepala Desa Numana Sinkronisasi pembangunan desa dengan SBPT untuk peluang usaha.	-	
Balai Taman Nasional Wakatobi SBPT Numana diarahkan dapat mendukung penyelenggaraan Taman Nasional Wakatobi.	±97% wilayah pembangunan SBPT Numana menjadi wewenang Balai TN Wakatobi.	
DLH Provinsi Sulawesi Tenggara SBPT perlu melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala.	-	
Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi Perencanaan pembangunan selaras dengan aktualisasi di lapangan.	-	

Pemangku Kepentingan yang Terlibat pada SBPT Numana

Berdasarkan hasil penelitian, pemangku kepentingan pada kelompok *key players* memiliki peran berbeda-beda. DKP Kabupaten Wakatobi dan KKP menjadi regulator dan evaluator perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian SBPT Numana. DKP Kabupaten Wakatobi juga menyiapkan

berbagai administrasi mulai penganggaran hingga *monitoring* pembangunan dan pengoperasian SBPT. PLN Rayon Wangi-Wangi, PDAM Wangi-Wangi, dan Pertamina menjadi fasilitator yaitu masing-masing sebagai penyedia jasa kelistrikan untuk sarana perkantoran dan gedung lainnya, penyedia air bersih untuk keperluan SBPT, dan penyedia bahan bakar minyak untuk nelayan. Menurut Syukhriani *et al.* (2018), pemerintah daerah berperan mengawasi, mengatur, fasilitator, dan mewujudkan program pemerintah pusat. Nelayan dan pengusaha perikanan menjadi implementator pada pengoperasian SBPT Numana. Nelayan berperan sebagai penyedia ikan hasil tangkapan dan pengusaha perikanan seperti pengumpul memberikan modal melaut untuk nelayan dan menambah pemasukan bagi daerah. Kelompok *key players* harus kooperatif dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program pembangunan (Nugroho *et al.* 2021).

Kelompok *subjects* menjadi implementator dan dipengaruhi oleh keberadaan SBPT Numana. kelompok *subjects* bersifat suportif, memiliki sedikit kapasitas untuk mengubah situasi tetapi dapat mempengaruhi orang/organisasi jika membuat aliansi, dan sebaliknya mereka dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lain (Bibin *et al.* 2018). Pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan adalah DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinilai memiliki pengaruh rendah terhadap SBPT Numana karena kurangnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan SBPT Numana. Kewenangan pengelolaan laut provinsi (0-12 mil) mengharuskan SBPT Numana menjadi wilayah pengelolaan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara (UU No. 23 Tahun 2014). Kepala Desa Numana dan BKIPM Wilker Wakatobi berfungsi sebagai regulator karena rencana pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana dilaksanakan pada wilayah pengelolaannya. Kelompok *subjects* dapat berperan sebagai regulator di tingkat lokal untuk hal-hal yang bersifat teknis (Nurfatriani *et al.* 2015). Kepala Desa Numana memfasilitasi proses pembebasan lahan akses masuk SBPT Numana dan BKIPM Wilker Wakatobi akan membantu proses pemantauan, pendataan, dan evaluasi kualitas komoditas perikanan yang keluar dari SBPT Numana. Tingkat kepentingan yang tinggi membuat kelompok *subjects* berupaya menjaga kawasan dan sumberdaya tetap lestari (Husain *et al.* 2019).

Kelompok *context setters* berperan sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator perencanaan dan pembangunan SBPT Numana. Perbedaan kelompok ini dengan kelompok *key players* yakni ketiadaan peran *implementator* dan tidak ada kepentingan ekonomi terhadap pengoperasian SBPT Numana. Kelompok *context setters* diharapkan responsif dalam perencanaan kebijakan ekonomi (Maani *et al.* 2021). Peran kelompok *context setters* paling utama adalah pada tahap perencanaan SBPT Numana. Balai Taman Nasional Wakatobi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menetapkan Perjanjian Kerja sama Pembangunan SBPT Numana pada wilayah taman nasional. Bappeda Kabupaten Wakatobi menyetujui program pembangunan SBPT Numana sehingga program tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang mengeluarkan izin lingkungan. Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi mengeluarkan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang bagi SBPT Numana. Oleh karena itu, persetujuan kelompok *context setters* menjadi syarat utama SBPT Numana dapat dibangun dan dioperasikan. Kelompok *context setters* sangat mungkin menjadi oposan atau minimal selalu mengintervensi (Purnama dan Sulastri 2014). Kelompok ini perlu diberikan informasi terkait program/proyek selama pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana oleh penanggung jawab, sebagai konsekuensi persetujuan berbagai syarat yang disetujui bersama pada tahap perencanaan SBPT Numana. Hubungan baik perlu dibina dengan kelompok *context setters* agar dapat berperan aktif mencapai tujuan (Husain *et al.* 2019).

Kelompok *crowds* perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan bersama untuk mencegah konflik atau krisis manajemen sehingga pengelolaan program dapat berjalan bersama-sama (Freeman *et al.* 2018). Dari enam (6) pemangku kepentingan pada kelompok *crowds*, Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi perlu diperhatikan karena ada pelabuhan umum di dekat lokasi SBPT Numana. Kondisi ini memungkinkan adanya benturan kepentingan seperti alur dan kolam pelabuhan yang berpotensi menghambat pengoperasian SBPT Numana. Tingkat kepentingan

kelompok *crowds* dapat berubah bergantung lokasi, proses pembangunan, dan upaya pengoperasian SBPT Numana karena matriks pengaruh-kepentingan bersifat dinamis (Reed *et al.* 2009).

Solusi terhadap Kendala Pemangku Kepentingan

Pembangunan SBPT Numana hingga saat ini belum dilanjutkan. Penyebab utamanya adalah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai syarat pembangunan belum dilengkapi seperti izin lingkungan. Selain itu, DKP Kabupaten Wakatobi perlu menyelesaikan dokumen studi kelayakan SBPT Numana karena merupakan bagian dari pengajuan izin lingkungan dan bertujuan meminimalkan resiko pada saat pembangunan maupun pengoperasian SBPT Numana. Hal penting lainnya adalah mengenai peran DKP Kabupaten Wakatobi yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan SBPT Numana. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penetapan lokasi dan pengelolaan pelabuhan perikanan tipe D, termasuk SBPT Numana merupakan tanggung jawab DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan DKP Kabupaten Wakatobi hanya dapat mengelola Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan hal ini, maka perlu komunikasi antara DKP Kabupaten Wakatobi dengan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membahas peran dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana.

Mengacu pada Tabel 7, terdapat beberapa kendala pemangku kepentingan dalam pembangunan dan upaya pengoperasian SBPT Numana. Perlu pendekatan penyelesaian kendala berdasarkan harapan/aspirasi pemangku kepentingan, yaitu:

Pertama: Menyelesaikan dokumen Amdal. DKP Kabupaten Wakatobi sebagai pemrakarsa bekerja sama dengan pihak penyedia jasa konsultan (pelaksana) melalui swakelola tipe III sehingga penyusunan dokumen Amdal dapat segera dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan personil dan bidang keahlian yang tersedia. Swakelola tipe ini bertujuan membantu pemerintah meningkatkan kualitas, jangkauan layanan, dan kemampuan teknis SDM (Efendi *et al.* 2019). Pada proses pengawasan, pemrakarsa sebaiknya bekerja sama dengan DLH Kabupaten Wakatobi, bersama-sama mengawal dan memastikan kesesuaian pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal hingga mendapatkan pengesahan dari komisi Amdal yang berwenang (DLH Provinsi Sulawesi Tenggara) sampai diterbitkannya izin lingkungan. Amdal dibutuhkan bagi proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan berkelanjutan (Mumpuni 2021).

Kedua: Menyusun dokumen WKOPP SBPT Numana. Penetapan WKOPP merupakan strategi prioritas pengembangan pelabuhan perikanan (Muammar *et al.* 2020). Pertimbangan penyusunan dokumen WKOPP adalah jarak yang dekat antara SBPT Numana dengan Dermaga Patinggu yang dikelola oleh Dishub Kabupaten Wakatobi (± 250 m) dan batas luas perairan laut yang ditetapkan oleh Balai TN Wakatobi. Balai TN Wakatobi, DKP, Dishub Kabupaten Wakatobi, Kades Numana dan instansi yang berkepentingan perlu menyusun dokumen WKOPP, sehingga alur transportasi terutama di wilayah laut dapat ditetapkan. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai peran maksimal pemangku kepentingan (Hidayat *et al.* 2020).

Ketiga: Meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). DKP Kabupaten Wakatobi segera menjalin komunikasi intens dengan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempersiapkan pembentukan kelembagaan pengelola SBPT Numana, termasuk ketersediaan sumber daya manusia, minimal sesuai standar struktur organisasi PPI. Penataan kelembagaan pelabuhan perikanan dilakukan dengan cara inventarisasi aspirasi *stakeholder* serta harmonisasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pelabuhan perikanan (Biasane 2014). Keterlibatan penting lainnya yakni pengalokasian anggaran program SBPT Numana oleh DKP Provinsi Sultra. Rencana anggaran program pengadaan sarana dan prasarana minimal mengacu pada kebutuhan nelayan yang belum masuk rencana pelaksanaan program/kegiatan DKP Kabupaten Wakatobi bersama Balai TN Wakatobi Tahun 2022-2031, seperti balai pertemuan dan tempat istirahat nelayan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas komunikasi, *coldbox*, dan TPS. Keterlibatan pemangku kepentingan

memberikan manfaat berupa penyelesaian masalah, tumbuhnya kepercayaan terhadap organisasi, dan meningkatkan citra organisasi dimata publik (Prasetyo 2020).

Keempat: Melaksanakan komitmen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Wakatobi bersama DKP Kabupaten Wakatobi yakni pelaksanaan program yang mendukung penyelenggaraan Taman Nasional Wakatobi. Kedua Pemangku kepentingan perlu memperkuat komitmen dengan menyusun regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan rencana pengelolaan perikanan tangkap. Regulasi dipandang sebagai keharusan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara luas di wilayah pesisir dan laut (Dimitrovski *et al.* 2021). Penetapan regulasi tersebut diharapkan meminimalisir konflik kepemilikan sumberdaya yang bersifat *open access* menjadi *state property* dan konflik pengelolaan sumberdaya yang memuat tujuan konservasi dan pemanfaatan/eksploitasi (Mahmud *et al.* 2016).

Kelima: Berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana untuk menjamin keberhasilan program SPBT Numana. Saat ini, penanggung jawab SBPT Numana adalah DKP Kabupaten Wakatobi, di mana OPD ini telah merencanakan, menganggarkan, dan membangun fasilitas dasar SBPT Numana. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penanggung jawab seharusnya adalah DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ini dapat menghambat upaya pengoperasian SBPT Numana, karena adanya ketidaksesuaian peran dan tanggung jawab oleh kedua pemangku kepentingan. Langkah krusial yang dapat ditempuh adalah kolaborasi pengelolaan SBPT Numana. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kedua pihak adalah melakukan Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), baik kerja sama wajib ataupun sukarela. Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilakukan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, harus melakukan koordinasi teknis di tingkat nasional, di mana hasil pembahasan disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama (PP No. 28 Tahun 2018). Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh aturan yang dibuat, disepakati bersama, dan pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewajiban (Zubayr *et al.* 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 22 pemangku kepentingan yang terlibat pada rencana pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana yang dipetakan menjadi empat kelompok yaitu *key players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowds*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan yang paling tinggi adalah DKP Kabupaten Wakatobi, kelompok nelayan/nelayan, PLN Rayon Wangi-Wangi, PDAM Wangi-Wangi, koperasi nelayan, Pertamina, KKP, dan pengusaha perikanan. Pendekatan penyelesaian kendala berdasarkan harapan/aspirasi pemangku kepentingan adalah menyusun dokumen Amdal dan WKOPP SBPT Numana, meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan komitmen PKS antara Balai TN Wakatobi bersama DKP Kabupaten Wakatobi, dan berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana.

Perencanaan, pembangunan, dan upaya pengoperasian SBPT Numana perlu mempertimbangkan aspirasi pemangku kepentingan. Pengambil kebijakan dapat mengimplementasikan rekomendasi penyelesaian kendala yang diusulkan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai penyedia Beasiswa Pendidikan Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi atas kerja sama dalam menyediakan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atashbahar O, Sari AA, Takian A, Olyaeemanesh A, Mohamadi E, Barakati SH. 2021. Integrated Early Childhood Development Policy in Iran: a Stakeholder Analysis. *BMC Health Services Research*. 21(1): 1-10.
- Bendtsen EB, Clausen LPW, Hansen SF. 2021. A Review of the State-of-the-Art for Stakeholder Analysis with Regard to Environmental Management and Regulation. *Journal of Environmental Management*. 279: 111773.
- Biasane DI. 2014. Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*. 16(2): 69-80.
- Bibin M, Vitner Y, Imran Z. 2018. Analysis of Stakeholder in the Development of Labombo Beach Sustainable Town in Palopo City. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 31(1): 62-71.
- Bryson JM. 2004. What to Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*. 6(1): 21-53.
- Dimitrovski D, Lemmetyinen A, Nieminen L, Pohjola T. 2021. Understanding Coastal And Marine Tourism Sustainability - A Multi-Stakeholder Analysis. *Jurnal of Destination Marketing & Management*. 19: 100554. (doi: [org/10.1016/j.jdmm.2021.100554](https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100554))
- [DKP-Kab. Wakatobi] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. 2021. Kajian Data Base Perikanan. Wakatobi: DKP-Kab. Wakatobi.
- Efendi R, Martini S, Sadoko I, Muslim A. 2019. Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial.
- Fedora SD, Hudiyo RF. 2019. Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kesekretariatan PT. Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*. 2(1): 38-46.
- Freeman ER, Civera C, Cortese D, Fiandrino S. 2018. Strategising Stakeholder Empowerment for Effective Co-Management Within Fishery-Based Commons. *British Food Journal*. 120(11): 2631-2644.
- Firmansyah F, Mustofa A, Estradivari, Damora A, Handayani C, Ahmadi G, Harris J. 2017. Satu Dekade Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi: Keberhasilan dan Tantangan Konservasi Laut. Jakarta: WWF-ID. <https://www.researchgate.net/publication/322853835>.
- Hidayat NC, Setijaningrum E, Asmorowati S. 2020. Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 19(2): 188-201.
- Husain A, Satria A, Kusmana C, Eriyatno. 2019. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Kota Gorontalo. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. 9(4): 1041-1052.
- [Kepmen] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. 2021.
- [Kepmen] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 2022.
- Maani KD, Fajri H, Wahyuni N, Malau H. 2021. Collaborative Governance sebagai Solusi dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa*. 7(2):73-88.

- Mahmud A, Satria A, Kinseng RA. 2016. Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan*. 11(1):45-54.
- Muammar R, Boesono H, Purnomo PW. 2020. Analysis of Bajomulyo Coastal Fishing Harbor Development in Pati Regency, Central Java, Indonesia. *International Journal of Oceans and Oceanography*. 14(1): 17-32.
- Mumpuni, NWR. 2021. Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Amnesti: Jurnal Hukum*. 3(2):71-86.
- Nugroho IA, Darwo, Yuniarti D. 2021. Stakeholders' Mapping and Strategy for Restoring Peatland Forest in West Tanjung Jabung Jambi, Indonesia. *Indonesian Journal of Forestry Research*. 8 (1): 37-57.
- Nurfatriani F, Darusman D, Nurrochmat DR, Yustika AE. 2015. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12 (2): 105-124.
- Purnama R, Sulastri. 2014. Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam Desain dan Implementasi Kebijakan UPI. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. 5(2): 85-96.
- Prasetyo, E. 2020. Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement): Studi Kasus Program Revaluasi Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 10(2): 1-16.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Stringer LC. 2009. Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management*. 90 (5):1933-1949.
- Soumokil RP. 2021. Strategy to Improve the Class of Ambon Archipelago Fisheries Port into an Ocean Fishery Port Using Swot Analysis. *Arika*. 15(1): 1-14.
- Syukhriani S, Nurani TW, Haluan J. 2018. Model Konseptual Pengembangan Perikanan Tongkol dan Cakalang yang Didaratkan di Kota Bengkulu. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 9(1): 1-11.
- Tahir M, Alimina N, Haya LOMY. 2020. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Sains dan Inovasi Perikanan*. 4(2): 63-73.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014.
- Widodo ML, Soekmadi R, Arifin HS. 2018. Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihung Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 8(1):55-61.
- Zubayr M, Darusman D, Nugroho B, Nurrohmat DR. 2014. Peranan Para Pihak dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(3): 239-259.